

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003
- Afif Hasbullah, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Arif Sritua, *Korupsi*, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan: 1986
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press, 2008
- , *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2004
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetk. Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Hamid Awaludin, *HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, Jakarta: Kompas, 2012
- Hendarmin Radadireksa, *Mahasiswa dan Pemuda Sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum & HAM*, Jakarta: Yayasan Annisa, 2002

- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014
- I Dewa Gede Atmadja et. al., *Demokrasi, HAM, & Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2011
- Ifdhal Kasim, *Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik*, Seri Bacaan Khusus HAM untuk Pengacara, Jakarta, Elsam: 2007
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *KISAH KORUPSI KITA: Anatomi Kasus-Kasus Besar dalam Kajian Interdisipliner*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2017
- Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2016
- Mahrus Ali dan Syaif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011
- Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana, 2017
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Muh. Khamdan dan Naniek Pangestuti, *Modul 3 Diklat Latihan Dasar Pelanggaran HAM*, Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2017
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetk. Kelima, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- OC Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Bandung: PT. Alumni: 2006

- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetk. Kelima, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013
- Rhona K.M. Smith et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008
- Sadino dan Rekan, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (Illegal Logging)*, Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetk. Keenam, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia (Suatu Perbandingan dalam Syariat Islam dan Perundang-Undangan)*, Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1993
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008
- Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Malang: Setara Press, 2015
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- , *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2015

B. Jurnal

- Astika Nurul Hidayah, “Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018
- Bambang Heri Supriyanto, “Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Vol. 2, No. 3, 2014
- Bambang Sutiyoso, “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan”, *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 17, 2010
- Daniel Alfaruqi, “Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (*Correlation of Human Rights and Islamic Law*)”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 4, No. 1, 2017
- Fika Ynlialdina Hakim, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia”, *Indonesia Journal of International Law*, Vol. 4, No. 1, 2006

- Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012
- Ida Bagus Ketut Weda, "Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya Untuk Pembangunan di Indonesia", *Jurnal Advokasi*, Vol. 3, No. 2, 2013
- Heribertus Jaka Triyana dan Aminoto, "Implementasi Standar Internasional Hak Ekosob oleh Pemerintah Provinsi DIY", *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 3, 2009
- James Reinaldo Rumpia dan H. S. Tisnanta, "Hukum dan Bahasa: Refleksi dan Transformasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya", *Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2018
- Maryanto, "Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, No. 2, 2012
- Muhammad Faisal Hamdani, "Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR)", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 16, No. 1, 2016
- Mukhamad Luthfan Setiaji dan Aminullah Ibrahim, "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara *the Rule of Law*: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2017
- Ni Putu Selyawati dan Maharani Chandra Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai HAM Universal Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2017
- Putu Ariesta Wiryawan dan Made Tjatrayasa, "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi", *Open Journal Systems*, Vol. 05, No. 02, 2016
- Retno Kusniati, "Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan HAM dalam Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011
- Schwars Marhani Tompodung, "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional", *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, 2019
- Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis", *HUMANIKA*, Vol. 18, No. 2, 2013
- Suprin Na'a, "Sebuah Kontemplasi tentang Klasifikasi Hak-Hak Asasi Manusia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2010

Tenang Haryanto et.al., “Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2008

Virgayani Fattah, “Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 2, Mei 2017

C. Perundang-Undangan

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rihts* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenant on Civil and Political Rights* (Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

D. Data Elektronik

Addi Mawahibun Idhom, *Akibat Korupsi, Uang Negara Menguap Rp. 168,19 triliun*, dalam <https://nasional.tempo.co/read/464996/akibat-korupsi-uang-negara-menguap-rp16819-triliun/full&view=ok>

Reski Kurniawan, *Polda: Kadishut Papua Aktor Intelektual Kasus Pemerasan*, http://rri.co.id/post/berita/620835/sigap_polri/polda_kadishut_papua_aktor_intelektual_kasus_pemerasan.html